



RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN 2024



Call Center : 184



SMS/ WA : 081 221 675 675



@humas_bnn



@infobnn_ri



INFOBNN



humasNewsBNN



Info_bnnri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Utama (Settama) Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2024.

Dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2023 ini merupakan gambaran program kerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam satu tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Settama BNN 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN Tahun 2024.

Dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2024 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol sebagai unit pendukung Settama BNN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.

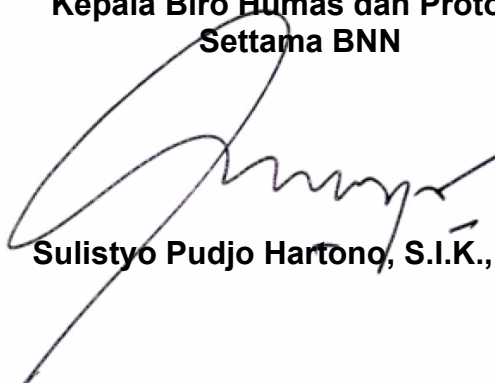
Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2024 menjadi salah satu dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Settama BNN Tahun 2024, yang akan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan di tahun 2024.

Ucapan terima kasih, diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2024 ini.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN pada tahun mendatang.

Jakarta, Desember 2024

**Kepala Biro Humas dan Protokol
Settama BNN**



Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

I. KONDISI UMUM

A. Permasalahan

Biro Humas dan Protokol memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BNN dalam melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, serta urusan protokol dan hubungan antar lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas, Biro Humas dan Protokol Settama BNN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peliputan, dokumentasi, wawancara, kunjungan pers, pengelolaan layanan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan media sosial; serta pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Biro Humas dan Protokol Settama BNN dituntut untuk menjalankan fungsi manajemen komunikasi yang baik dan diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi seimbang antara BNN dengan publik dan sebaliknya serta memberikan pelayanan kehumasan yang maksimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan strategi dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara BNN dengan publik, sehingga memperoleh pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kehumasan.

Memasuki era disrupsi teknologi digital, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam menjalankan tugas dan fungsi hubungan masyarakat serta keprotokolannya kian kompleks. Adapun identifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol Settama BNN adalah sebagai berikut :

1. Isu Hubungan Masyarakat dan Informasi

Permasalahan menonjol dalam isu hubungan masyarakat dan informasi adalah kekuatan dalam membangun dan mempengaruhi opini publik terhadap kiprah BNN dalam melaksanakan tugas P4GN.

2. Isu Protokoler

Permasalahan menonjol dalam isu protokoler adalah profesionalisme dan kualitas dalam memberikan pelayanan keprotokoleran kepada para pengguna layanan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku.

B. Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2022, capaian opini publik terhadap BNN, terdapat hasil perhitungan yang menunjukkan tingkat opini Publik terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memiliki nilai konversi 77.32 atau memiliki kinerja Baik. yang mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan opini positif terkait kelembagaan BNN. Hasil ini menunjukkan tren positif dari tahun ketahun, hal tersebut merupakan indikasi kegiatan yang dilakukan telah pada posisi yang sesuai. Hal tersebut sejalan dengan indikator kinerja output di level eselon dua yang juga berada pada posisi yang baik

Meskipun dapat dikatakan berhasil, namun pencapaian tersebut masih memiliki kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pembentukan opini publik didasarkan pada kinerja BNN yang dipublikasikan oleh media massa. Pembentukan dan penggiringan opini publik melalui berbagai media informasi akan membentuk persepsi atau citra instansi di mata masyarakat. Selain hal tersebut, terbentuknya opini publik juga tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap BNN di masa lampau dan kinerja masing-masing Satker di BNN secara umum.
2. Terbatasnya dukungan anggaran publikasi kinerja BNN tidak berbanding dengan perkembangan teknologi.
3. Tidak mudah membangun kedekatan dengan media masa yang mempublikasikan kinerja BNN.

4. Perlu pengembangan organisasi Biro Humas dan Protokol BNN hingga ke wilayah (BNNP/BNNK/Kota), untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kehumasan daerah
5. Dikarenakan pengisian DSP Biro Humas dan Protokol BNN masih jauh dari yang diharapkan maka perlunya adanya penambahan personil dalam mendukung kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokoleran.
6. Perlu segera dilakukan pemenuhan jabatan-jabatan sesuai dengan DSP yang telah ditetapkan.
7. Perlu segera dilaksanakan bimbingan teknis bagi Pranata Humas di Biro Humas dan Protokol guna peningkatan kompetensi dan kinerja kehumasan.

II. LANDASAN HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- F. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- G. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- H. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

- I. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
- J. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- K. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
- L. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN TAHUN 2023

Biro Humas dan Protokol Settama BNN menetapkan rencana kinerja tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2023 sebagai gambaran rencana program kerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Biro Humas dan Protokol Settama BNN tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RP RIBU)
1.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan	3,71 indeks	Rp. 6.754.913.000,-
			Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokoler	86,5 %	

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN serta sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Perencanaan kinerja tahunan Biro Humas dan Protokol Settama tahun 2024 ini merupakan salah satu upaya agar lebih terarah dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan tahun 2024 ini disesuaikan dengan kebutuhan BNN khususnya dalam meningkatkan fungsi layanan kehumasan, publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal sehingga terciptanya opini publik yang baik terhadap BNN sebagai *leading sector dalam P4GN*.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu media informasi publik yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program kegiatan Biro Humas dan Protokol Settama BNN kepada masyarakat sebagai wujud transparansi informasi dan kinerja BNN menuju *good governance* dan *clean governance*.

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA VOLUME RINCIAN OUTPUT KEGIATAN
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN
TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO
1.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
		Layanan Protokoler	1 Layanan

LAMPIRAN

SEBARAN ALOKASI ANGGARAN DAN VOLUME

RINCIAN OUTPUT LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	20,000,000	1 Layanan
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	10,000,000	1 Layanan
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	10,000,000	1 Layanan
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	10,000,000	1 Layanan
5	BNN KOTA SABANG	10,000,000	1 Layanan
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	10,000,000	1 Layanan
7	BNN KOTA LANGSA	10,000,000	1 Layanan
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	10,000,000	1 Layanan
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	10,000,000	1 Layanan
10	BNN KABUPATEN PIDIE	10,000,000	1 Layanan
11	BNN KOTA BANDA ACEH	10,000,000	1 Layanan
12	BNNP SUMATERA UTARA	20,000,000	1 Layanan
13	BNN KABUPATEN KARO	10,000,000	1 Layanan
14	BNN KOTA BINJAI	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	10,000,000	1 Layanan
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	10,000,000	1 Layanan
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	10,000,000	1 Layanan
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	10,000,000	1 Layanan
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	10,000,000	1 Layanan
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	10,000,000	1 Layanan
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	10,000,000	1 Layanan
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	10,000,000	1 Layanan
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	10,000,000	1 Layanan
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	10,000,000	1 Layanan
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	10,000,000	1 Layanan
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	10,000,000	1 Layanan
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	10,000,000	1 Layanan
28	BNNP SUMATERA BARAT	20,000,000	1 Layanan
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	10,000,000	1 Layanan
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	10,000,000	1 Layanan
31	BNN KABUPATEN SOLOK	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	10,000,000	1 Layanan
33	BNNP RIAU	20,000,000	1 Layanan
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	10,000,000	1 Layanan
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	10,000,000	1 Layanan
36	BNN KOTA PEKANBARU	10,000,000	1 Layanan
37	BNN KOTA DUMAI	10,000,000	1 Layanan
38	BNNP JAMBI	20,000,000	1 Layanan
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	10,000,000	1 Layanan
40	BNN KOTA JAMBI	10,000,000	1 Layanan
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	10,000,000	1 Layanan
42	BNNP SUMATERA SELATAN	20,000,000	1 Layanan
43	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	10,000,000	1 Layanan
44	BNN KOTA PAGARALAM	10,000,000	1 Layanan
45	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	10,000,000	1 Layanan
46	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	10,000,000	1 Layanan
47	BNN KOTA PRABUMULIH	10,000,000	1 Layanan
48	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
49	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	10,000,000	1 Layanan
50	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	10,000,000	1 Layanan
51	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	10,000,000	1 Layanan
52	BNNP LAMPUNG	20,000,000	1 Layanan
53	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	10,000,000	1 Layanan
54	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	10,000,000	1 Layanan
55	BNN KOTA METRO	10,000,000	1 Layanan
56	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	10,000,000	1 Layanan
57	BNN KABUPATEN WAY KANAN	10,000,000	1 Layanan
58	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20,000,000	1 Layanan
59	BNN KABUPATEN BANGKA	10,000,000	1 Layanan
60	BNN KOTA PANGKAL PINANG	10,000,000	1 Layanan
61	BNN KABUPATEN BELITUNG	10,000,000	1 Layanan
62	BNNP BANGKA SELATAN	10,000,000	1 Layanan
63	BNNP KEPULAUAN RIAU	20,000,000	1 Layanan
64	BNN KABUPATEN KARIMUN	10,000,000	1 Layanan
65	BNN KOTA BATAM	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
66	BNN KOTA TANJUNG PINANG	10,000,000	1 Layanan
67	BNNP BENGKULU	20,000,000	1 Layanan
68	BNN KOTA BENGKULU	10,000,000	1 Layanan
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	10,000,000	1 Layanan
70	BNNP DKI JAKARTA	20,000,000	1 Layanan
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	10,000,000	1 Layanan
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	10,000,000	1 Layanan
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	10,000,000	1 Layanan
74	BNNP BANTEN	20,000,000	1 Layanan
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	10,000,000	1 Layanan
76	BNN KOTA CILEGON	10,000,000	1 Layanan
77	BNN KOTA TANGERANG	10,000,000	1 Layanan
78	BNNP JAWA BARAT	20,000,000	1 Layanan
79	BNN KABUPATEN BOGOR	10,000,000	1 Layanan
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	10,000,000	1 Layanan
81	BNN KOTA BANDUNG	10,000,000	1 Layanan
82	BNN KOTA CIREBON	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
83	BNN KOTA CIMAHI	10,000,000	1 Layanan
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	10,000,000	1 Layanan
85	BNN KABUPATEN GARUT	10,000,000	1 Layanan
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	10,000,000	1 Layanan
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	10,000,000	1 Layanan
88	BNN KOTA DEPOK	10,000,000	1 Layanan
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	10,000,000	1 Layanan
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	10,000,000	1 Layanan
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	10,000,000	1 Layanan
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	10,000,000	1 Layanan
93	BNNP JAWA TENGAH	20,000,000	1 Layanan
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	10,000,000	1 Layanan
95	BNN KOTA TEGAL	10,000,000	1 Layanan
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	10,000,000	1 Layanan
97	BNN KABUPATEN CILACAP	10,000,000	1 Layanan
98	BNN KABUPATEN KENDAL	10,000,000	1 Layanan
99	BNN KABUPATEN BATANG	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	10,000,000	1 Layanan
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	10,000,000	1 Layanan
102	BNN KOTA SURAKARTA	10,000,000	1 Layanan
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	20,000,000	1 Layanan
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	10,000,000	1 Layanan
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	10,000,000	1 Layanan
106	BNN KABUPATEN BANTUL	10,000,000	1 Layanan
107	BNNP JAWA TIMUR	20,000,000	1 Layanan
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	10,000,000	1 Layanan
109	BNN KOTA MOJOKERTO	10,000,000	1 Layanan
110	BNN KOTA MALANG	10,000,000	1 Layanan
111	BNN KOTA BATU	10,000,000	1 Layanan
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	10,000,000	1 Layanan
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	10,000,000	1 Layanan
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	10,000,000	1 Layanan
115	BNN KOTA SURABAYA	10,000,000	1 Layanan
116	BNN KOTA KEDIRI	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
117	BNN KABUPATEN MALANG	10,000,000	1 Layanan
118	BNN KABUPATEN GRESIK	10,000,000	1 Layanan
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	10,000,000	1 Layanan
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	10,000,000	1 Layanan
121	BNN KABUPATEN BLITAR	10,000,000	1 Layanan
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	10,000,000	1 Layanan
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	10,000,000	1 Layanan
124	BNN KABUPATEN TUBAN	10,000,000	1 Layanan
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	20,000,000	1 Layanan
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	10,000,000	1 Layanan
127	BNN KABUPATEN SINTANG	10,000,000	1 Layanan
128	BNN KOTA PONTIANAK	10,000,000	1 Layanan
129	BNN KOTA SINGKAWANG	10,000,000	1 Layanan
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	10,000,000	1 Layanan
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	10,000,000	1 Layanan
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	10,000,000	1 Layanan
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	20,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	10,000,000	1 Layanan
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	10,000,000	1 Layanan
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	20,000,000	1 Layanan
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	10,000,000	1 Layanan
138	BNN KOTA BANJARMASIN	10,000,000	1 Layanan
139	BNN KOTA BANJARBARU	10,000,000	1 Layanan
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	10,000,000	1 Layanan
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	10,000,000	1 Layanan
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	10,000,000	1 Layanan
143	BNN KABUPATEN TABALONG	10,000,000	1 Layanan
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	10,000,000	1 Layanan
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	20,000,000	1 Layanan
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	10,000,000	1 Layanan
147	BNN KOTA SAMARINDA	10,000,000	1 Layanan
148	BNN KOTA BONTANG	10,000,000	1 Layanan
149	BNNP KALIMANTAN UTARA	20,000,000	1 Layanan
150	BNN KOTA TARAKAN	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
151	BNN KABUPATEN NUNUKAN	10,000,000	1 Layanan
152	BNNP SULAWESI UTARA	20,000,000	1 Layanan
153	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	10,000,000	1 Layanan
154	BNN KOTA BITUNG	10,000,000	1 Layanan
155	BNN KOTA MANADO	10,000,000	1 Layanan
156	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	10,000,000	1 Layanan
157	BNNP SULAWESI TENGAH	20,000,000	1 Layanan
158	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	10,000,000	1 Layanan
159	BNN KABUPATEN MOROWALI	10,000,000	1 Layanan
160	BNN KOTA PALU	10,000,000	1 Layanan
161	BNN KABUPATEN DONGGALA	10,000,000	1 Layanan
162	BNN KABUPATEN POSO	10,000,000	1 Layanan
163	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	10,000,000	1 Layanan
164	BNNP SULAWESI SELATAN	20,000,000	1 Layanan
165	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	10,000,000	1 Layanan
166	BNN KABUPATEN BONE	10,000,000	1 Layanan
167	BNN KOTA PALOPO	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
168	BNNP SULAWESI TENGGARA	20,000,000	1 Layanan
169	BNN KABUPATEN MUNA	10,000,000	1 Layanan
170	BNN KABUPATEN KOLAKA	10,000,000	1 Layanan
171	BNN KOTA KENDARI	10,000,000	1 Layanan
172	BNN KOTA BAU-BAU	10,000,000	1 Layanan
173	BNNP SULAWESI BARAT	20,000,000	1 Layanan
174	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	10,000,000	1 Layanan
175	BNNP MALUKU	20,000,000	1 Layanan
176	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	10,000,000	1 Layanan
177	BNN KOTA TUAL	10,000,000	1 Layanan
178	BNNP MALUKU UTARA	20,000,000	1 Layanan
179	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	10,000,000	1 Layanan
180	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	10,000,000	1 Layanan
181	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	10,000,000	1 Layanan
182	BNNP BALI	20,000,000	1 Layanan
183	BNN KOTA DENPASAR	10,000,000	1 Layanan
184	BNN KABUPATEN BADUNG	10,000,000	1 Layanan

NO.	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOLUME RO
185	BNN KABUPATEN GIANYAR	10,000,000	1 Layanan
186	BNN KABUPATEN BULELENG	10,000,000	1 Layanan
187	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	10,000,000	1 Layanan
188	BNN KABUPATEN KARANGASEM	10,000,000	1 Layanan
189	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	20,000,000	1 Layanan
190	BNN KABUPATEN BIMA	10,000,000	1 Layanan
191	BNN KOTA MATARAM	10,000,000	1 Layanan
192	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	10,000,000	1 Layanan
193	BNN KABUPATEN SUMBAWA	10,000,000	1 Layanan
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	20,000,000	1 Layanan
195	BNN KABUPATEN BELU	10,000,000	1 Layanan
196	BNN KOTA KUPANG	10,000,000	1 Layanan
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	10,000,000	1 Layanan
198	BNNP GORONTALO	20,000,000	1 Layanan
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	10,000,000	1 Layanan
200	BNN KOTA GORONTALO	10,000,000	1 Layanan
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	10,000,000	1 Layanan